

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aswin. 2000. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Kebijakan Dan Pelayanan Publik, Editor Didi Marzuki, Pengantar, Taufik Efendi, MBA.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Guntur, S. (2004). Implementasi dalam birokrasi pembangunan. *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Hasan, M. I. (2002). Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya.
- Moleong, L. J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods 3rd. ed.* Sage publications.
- Ratminto dan Atik Septiwinarsih. 2006. Manajemen Pelayanan Publik, Pustaka, Yogyakarta
- Rianto Nugroho A. 2002. Kebijakan Publik, Model Perumusan Implementasi dan Evaluasi, Jakarta.
- Sugiyono, Sugiyono. "Metode penelitian kualitatif. bandung: Alfabeta." *Google Scholar Alfabeta* (2013).
- Sururi, M. P., Hafidh, Z., & Afifah, D. A. (2023). *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis dan Model Implementasi Kebijakan Edwards* Indonesia Emas Group.
- Widodo, J. (2001). *Good governance: telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Insan Cendekia.

Skripsi dan Jurnal

- Afrizal, R. (2019). "Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Perspektif Fiqh Siyasah."
- Andi Bau Mallarangeng, Ari Wiyanto Arif, D. H. (2023). Implementasi Undang-

- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Penerbitan Surat Ijin Mengemudi di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, 2(1), 1–15.
<https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view>
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Good Governance Principles in Running Governance). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 64, 401–420.
- Christina, M., Herawati, E., & Afrilia, U. A. (2024). Urgensi Perubahan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 7(25), 229–239.
- Dewi, L. palupi K. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun Dengan Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Yogyakarta)*. 1–51.
- Fitriani, L. (2021). Sistem Antrean dan Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 8(2), 134-150.
- Haekal, H., & Tjenreng, M. (2024). Implementasi Standar Operasional Prosedur dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(1), 78-95.
- Hidayat, R., & Asni, F. (2021). Implementasi E-Court dalam Pelayanan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145-162.
- Lawiya, M. A., Nirahua, S. E. M., & Mustamu, J. (2023). Penerapan Standar Pelayanan Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *LUTUR Law Journal*, 4(1), 19–26.
<https://doi.org/10.30598/lutur.v4i1.10497>
- Mansyur, M., & Supriyatno, H. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Perpustakaan Perguruan Tinggi: Kajian Implementasi UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di Perpustakaan PTKIN se- Propinsi Jawa Timur. *Indonesian Journal of Academic Librarianship*,

3(1), 1– 14.

- Marthalina, M. (2021). Analisis Dampak Pengembangan Karir PNS Pasca Pelaksanaan Alih Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 9(1), 42-55.
- Nurhestitunggal, M., & Muhlisin, M. (2020). Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III dan IV. *Jurnal Reformasi Birokrasi*, 12(2), 156-173.
- Prasetyani, D. (2023). Aksesibilitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 89-104.
- Pratama, A. D. (2019). Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009. *Palembang: Universitas Sri Wijaya, October*.
- Rahmawati, S., Kurniawan, T., & Wijaya, A. (2024). Efektivitas E-Litigationa dalam Penyelesaian Perkara Perceraian. *Jurnal Peradilan Modern*, 8(1), 45-62.
- Sangaji, M. I. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Digitalisasi: Analisis Implementasi dan Dampaknya terhadap Kualitas Layanan. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(1), 54-70.
- Setiawan, R., Hartono, B., & Kusuma, A. (2024). Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Hukum Adaptif di Era Digital. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(2), 156- 173.
- Sulistyaningsih, R., & Wibowo, A. (2021). Struktur Birokrasi dan Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 13(2), 167-184.
- Setyobudi, Y. F. (2009). Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Tentang Pelayanan Publik. *Journal.Unrika.Ac.Id*, 25, 1–9.
<http://arsimurti.blog.ugm.ac.id/2013/01/18/pelayanan-prima-dalam-konteks-pelayanan-publik>,
- Turhindayani, T. (2020). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 4(4).
- Widodo, J., & Setiawan, B. (2020). Beban Kerja dan Kualitas Pelayanan Publik:

Studi pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 4(1), 45-62. Wiranata, R. A., & Kristhy, M. E. (2022). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Sebagai Values Of Law Atas Pelayanan Publik Terhadap Penyandang Disabilitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 208-218.

Yulistiani, A. (2025). *Implementasi Undang-undang No. 25 Tahun 2009: Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Publik Pada Bab (1) pasal (1) Ayat (1) Di Kantor Camat Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

Website

<https://sipp.pa-bekasi.go.id/>

Undang-Undang

Undang-Undang No 25 Tahun 2009

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.25 Tahun 2009

Pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 200